

## DAFTAR BACAAN

### 1. Buku

- Amrullah, M.Arief, Tindak Pidana pencucian Uang (Money Laundering), Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Effendy, Marwan., Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana), Referensi, Jakarta, 2012
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Muhadar, dkk, Perlindungan Saksi dan Korban (Dalam Sistem Peradilan Pidana), CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Marzuki, Pieter Mahmud., Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Soemodihardjo, Dyatmiko, Memberantas Korupsi Di Indonesia, Shira Media, Yogyakarta, 2012.
- Soeskandi, Hari, Hukum Acara Pidana (sebuah ringkasan tentang pemeriksaan pendahuluan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 2016
- Waluyo, Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban&Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Wijaya, Firman., Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Prespektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012.
- Yanto, Oksidelta., Mafia Hukum Membongkar Manipulasi dan Konspirasi Hukum Di Indonesia, Raih Asa Sukses PT.Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2011.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- The Whistleblower's Protection Act 469 of 1980 United States of Michigan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- The Whistleblower Protection Act 1989 United States

Public Interest Disclosure Act 1998

PP No. 7 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

United Nations Convention Against Corruption (USA) 2003

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### 3. Sumber Lain

Statushukum.com/perlindungan-hukum.html(diakses pada tanggal 12/10/2016 pukul 11.00 WIB)

<https://id.tagdef.com/whistleblower> (diakses pada hari sabtu, 12 Oktober 2016, pukul 12.06)

KPK Whistleblower System, <http://kws.kpk.go.id/> (diakses pada tanggal 13 oktober 2016 pukul 21.01)

<http://www.magipendidikan.wordpress.com/konflik-kepentingan> (diakses pada tanggal 10 Desember 2016),

<http://www.hukumonline.com/definisi-saksi-mahkota> (dikases pada tanggal 19 Desember 2016)

<http://radarcirebon.com-kasus-damayanti> (diakses pada 29 september 2016)

*Whistleblower Protection Laws (1989)*, Robert G, Vaughn, <http://www.enotes.com/major-acts> congress/whistleblower-protection-laws. (diakses pada tanggal 13 November 2016)

<http://www.negarahukum.com/hukum/anas-whistle-blower-dan-jalan-tengah-politisasi-hukum.html>.(diakses pada tanggal 22 November 2016)

Susno Duajdi Menggugat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2006, html. (diakses pada tanggal 22 November 2016)